



Analisis Perang Hibrida Rusia Terhadap Ukraina Di Krimea Tahun 2014

Naufalariq Rizqi Ramadhan ¹⁾, Penny Kurnia Putri ²⁾, Putu Titah Kawitri Resen ³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Rusia dalam melaksanakan perang hibrida di Krimea pada tahun 2014, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka. Penangguhan kerja sama EAA (European Association Agreement) antara Ukraina dengan Uni Eropa memicu pemberontakan yang menuntut Yanukovych mundur, Rusia memanfaatkan keadaan tersebut untuk merebut kembali Krimea. Karena kedekatan Ukraina dengan Barat, Rusia menerapkan perang hibrida dalam menjalankan aksinya. Dalam menganalisis kasus ini, peneliti menggunakan teori strategis serta konsep keamanan nasional, dan mengidentifikasi bahwa Rusia menggunakan metode perang yang pernah dilakukan oleh Uni Soviet sebelumnya, yakni Rusia menerapkan doktrin Gerasimov dalam menghadapi perang asimetris, dengan menambahkan kebaruan yang didukung oleh berkembangnya teknologi. Selanjutnya, melalui analisis konsep keamanan nasional, peneliti menemukan faktor-faktor yang memengaruhi Rusia melakukan perang hibrida, antara lain: keinginan Rusia untuk menguasai *Black Sea Fleet* secara utuh (faktor militer), Rusia ingin menunjukkan pengaruh ekonominya yang masif terhadap Barat (faktor ekonomi), Ukraina merupakan *buffer zone* bagi Rusia (faktor geostrategi), dan yang terakhir ialah Rusia ingin melindungi warga Rusia dan penutur Bahasa Rusia di Krimea (faktor etnis).

Kata-kunci : Keamanan Nasional, Krimea, Perang Hibrida, Rusia-Ukraina

Abstract

This study aimed to analyzing the factors that influenced Russia in carrying out a hybrid war in Crimea in 2014, using a qualitative descriptive method with data sources obtained through literature studies. The suspension of the EAA (European Association Agreement) cooperation between Ukraine and the European Union sparked an uprising that demanded Yanukovych's resignation, Russia used the situation to retake Crimea. Because it is close to the West, Russia applies hybrid warfare in carrying out its actions. In analyzing this case, the researcher uses the theory of strategy and the concept of national security, and identifies that Russia uses the methods of war that have been carried out by the Soviet Union before, namely applying the Gerasimov doctrine in the face of asymmetric war, by adding novelties that are supported by technological developments. Furthermore, through the analysis of the concept of national security, we found the factors that influenced Russia to carry out a hybrid war, including: Russia's desire to control the Black Sea Fleet as a whole (military factor), Russia wanted to show its massive economic influence on the West

(economic factor), Ukraine is a buffer zone for Russia (geostrategic factor), and lastly, Russia wants to protect Russian citizens and Russian speakers in Crimea (ethnic factor).

Keywords : *Crimea, Hybrid War, National Security, Russia-Ukraine*

Kontak Penulis

Naufalariq Rizqi Ramadhan

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62 361 255378 Fax: +62 361 255916

Email: naufalramadhanariq@gmail.com

PENDAHULUAN

Rusia merupakan pewaris utama sebagian besar dari wilayah Uni Soviet yang menjadi aktor dominan di kawasan Laut Hitam. Tidak heran apabila Rusia mengintervensi urusan Ukraina yang juga merupakan pecahan wilayah Uni Soviet. Pada tahun 2014, hubungan antara Rusia dengan Ukraina memanas dikarenakan aneksasi Rusia terhadap Krimea yang pada dasarnya merupakan bagian dari wilayah Ukraina. Karena kedudukannya yang penting di faktor historis dan strategisnya, Rusia begitu memperjuangkannya sehingga Rusia berusaha menganeksasi Krimea dari Ukraina.

Di dunia internasional, Ukraina kerap bermitra dengan NATO. Kemitraan antar keduanya menguat pada tahun 1997, dengan terbentuknya *NATO-Ukraine Commission* (NATO, 11/11/2020). Kedekatan antara Ukraina dengan Barat dipandang Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingannya. Bahkan integrasi antara Ukraina dengan Barat dalam berbagai sektor, secara terbuka ditentang oleh Rusia (Bebler, 2015: 15). Sama halnya ketika Rusia meminta Ukraina untuk menanggukkan kesepakatan dari program kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa yakni *European Association Agreement* pada 21 November 2013, pada saat itu Ukraina berada di bawah kepemimpinan Viktor Yanukovich yang pro terhadap Rusia. Penanggukan kerjasama tersebut berdampak pada stabilitas domestik Ukraina, sehingga menimbulkan demonstrasi dengan berbagai tuntutan yang kemudian dikenal dengan *Events of Euromaidan*. Demonstrasi dengan berbagai tuntutan tersebut berujung pada keributan serta menimbulkan korban jiwa.

Dari segala kekacauan domestik yang terjadi di Ukraina serta revolusi yang dinilai berhasil itu, Vladimir Putin memerintahkan supaya segera merilis agenda aneksasi Krimea (Kurkov, 21/11/2014). Dalam merebut Krimea, Rusia menggunakan strategi perang hibrida. Penggunaan strategi perang hibrida

oleh Rusia ini disebabkan karena kedekatan antara Ukraina dengan koalisi Barat, yang dimana Rusia timpang secara ekonomi dan militer. Dalam penerapannya, Rusia melakukan penekanan terhadap ekonomi Ukraina dengan gas, propaganda Rusia melalui media massa, pengerahan pasukan Rusia yang kemudian ditempatkan di Semenanjung Krimea yang juga diikuti dengan kehadiran *Green Little Army* atau *Polite Green Men* serta menciptakan situasi yang tidak kondusif terutama di Semenanjung Krimea. Hingga kemudian pada 16 Maret 2014, diadakanlah referendum mengenai tindakan politik Krimea, dengan hasil mayoritas pemilih menyetujui untuk bergabung dengan Federasi Rusia yang diikuti dengan proklamasi kemerdekaan oleh Parlemen Krimea pada keesokan harinya.

Penelitian ini menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Literatur pertama berjudul "*Challenges Facing National Security in the Arab Gulf States: A Case Study of Bahrain*," yang ditulis oleh Dr. Ahd A. Mashagbeh, Dr. Mohammed T. Bani Salameh, dan Dr. Sayel F. Al Serhan (2017). Literatur ini mengacu pada konsep keamanan nasional yang dipaparkan secara komprehensif dengan mengambil studi kasus Bahrain. Pada 14 Februari 2001, merupakan hari dimana disahkannya *National Action Charter* atau Piagam Aksi Nasional. Adapun dalam piagam tersebut disebutkan bahwa keamanan merupakan pagar serta benteng pertahanan negara, pemeliharaan lahan dan juga ekonomi, sosial, serta politik guna mendukung proses pembangunan yang komprehensif, khususnya dibawah regional kontemporer serta perubahan internasional.

Mashagbeh, et.al. menyebutkan sebanyak lima tantangan keamanan nasional Bahrain yang melingkupi berbagai aspek dari unsur keamanan kontemporer. Adapun tantangan yang pertama yakni mengenai perbatasan negara, sebab Bahrain merupakan

negara yang memiliki wilayah kecil dan beberapa pulau. Selain itu, Bahrain menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai pendirian pangkalan militer serta pengerahan militernya ke Bahrain, sehingga menimbulkan ancaman bagi negara tetangganya seperti Iran yang juga kerap mengintervensi urusan internal Bahrain, terlebih Iran juga mendukung pihak oposisi Bahrain. Kedua ialah identitas nasional, masyarakat Bahrain terbagi menjadi kelompok sektarian Sunni dan Syi'ah dan dalam kelompok tersebut juga terdapat kelompok lagi yang terhubung dengan kelompok serupa diluar Bahrain sehingga menimbulkan manuver juga polarisasi terhadap politik dan sosial Bahrain. Ketiga merupakan tantangan keamanan politik, keempat adalah tantangan keamanan ekonomi, dan yang terakhir ialah tantangan dominasi asing.

Menurut analisis Mashagbeh et.al. terdapat tiga langkah yang digunakan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional Bahrain. Pertama ialah menentukan konsep strategis baru dalam menghadapi tantangan tersebut, kedua dengan persatuan dalam satu entitas, dan yang terakhir ialah memulai reformasi internal. Literatur ini membantu penulis dalam menganalisis kasus dengan konsep keamanan yang komprehensif pada isu global yang kontemporer.

Literatur kedua ialah sebuah thesis yang ditulis oleh Gage A. Adam (2017) dengan judul "*Evaluating the Success of Russian Hybrid Warfare in Ukraine.*" Thesis berisikan seputar evaluasi kesuksesan pelaksanaan perang hibrida yang dilakukan oleh Rusia di Krimea. Menurut Adam, keberhasilan perang hibrida salah satunya diukur dari kalkulasi untung-rugi pada sektor ekonomi Rusia. Adam menyatakan bahwa pada pelaksanaan perang hibrida, Rusia menggelontorkan dana yang cukup tinggi untuk militer serta infrastruktur.

Tidak hanya itu, Rusia juga menuai kecemasan Barat atas tindakannya. Secara keseluruhan, Adam membingkai analisisnya dalam sudut pandang ekonomi, yakni tentang bagaimana Rusia memanfaatkan sektor ekonomi dalam memenangkan pertarungannya dengan Ukraina.

Dalam sektor perekonomian, Rusia mendirikan *Eurasian Economic Union* atau yang dikenal dengan EAEU. Berdirinya EAEU merupakan cara Rusia menarik negara-negara bekas wilayah Uni Soviet supaya terintegrasi dalam suatu wadah perekonomian. Dalam lingkup forum kerja sama tersebut, Rusia menebarkan jaring politiknya serta sebagai cara untuk membendung pengaruh Uni Eropa. Adapun kondisi perekonomian Ukraina semasa perang hibrida sangat bergantung kepada Rusia, terutama terkait monopoli pasar hidrokarbon oleh Rusia, sehingga harga gas alam yang menjadi kebutuhan utama Ukraina akhirnya melambung tinggi.

Berdasarkan analisis Adam, dapat dilihat bahwa sektor ekonomi menjadi krusial dalam strategi perang hibrida Rusia. Hegemoni yang dilakukan Rusia melalui forum EAEU-nya di wilayah bekas Uni Soviet merupakan implementasi dari hal tersebut. Kondisi perekonomian Ukraina yang melemah akibat monopoli pasar, akhirnya memicu ketidakstabilan domestik berupa demonstrasi, sehingga Ukraina tidak siap dalam mengantisipasi aneksasi Krimea oleh Rusia.

Tulisan Adam membantu penulis dalam mengidentifikasi faktor ekonomi dalam pelaksanaan perang hibrida. Sementara Adam memaparkan mengenai prosesnya, disini penulis akan menganalisis mengenai latar belakangnya. Lebih lanjut, penulis akan mengembangkan analisis tidak hanya pada faktor ekonomi, namun juga pada faktor keamanan, politik, dan sosial-budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan berbagai faktor yang memengaruhi Rusia dalam menjalankan strategi perang hibrida terhadap Ukraina pada tahun 2014.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan metode daring serta luring dalam memperoleh data yang diperlukan. Adapun penelitian ini menggunakan tingkat analisis negara sebab penulis menjadikan Rusia sebagai perspektif dalam menganalisis faktor yang memengaruhi Rusia menerapkan strategi perang hibrida terhadap Ukraina pada tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Krimea di Antara Kekuasaan Rusia dan Ukraina

Pada Februari 1954 Krimea yang sebelumnya menjadi bagian dari Republik Sosialis Federasi Rusia beralih secara administratif berada dibawah bendera Republik Sosialis Soviet Ukraina. Sehingga Krimea menjadi wilayah dari Ukraina yang mayoritas penduduknya beretnis Rusia (Pikulicka-Wilczewska & Sakwa, 2015). Pemandangan tersebut didasari atas dikeluarkannya dekrit oleh Presidium Soviet Tertinggi Uni Soviet sebagai simbol persaudaran dalam memperingati 300 tahun bergabungnya Ukraina kepada Kekaisaran Rusia dibawah Perjanjian Pereyaslav.

Semenjak tahun 1991 sengketa antara Ukraina dengan Krimea yang ingin merdeka menjadi Republik Otonom sudah berlangsung sehingga keduanya selalu terlibat dalam pusaran konflik, bahkan di tahun 1991 dan 1992 sudah pernah diadakan referendum mengenai status Krimea oleh pemerintah Krimea dan partai lokal Krimea. Sengketa mengenai status Krimea antara rakyat Krimea dengan pemerintahan Ukraina kemudian kembali terpantik di tahun 2014 yang diawali dengan momentum pada tahun akhir tahun 2013, yang bermula ketika Presiden Ukraina yang pada saat itu dipimpin oleh Viktor

Yanukovch tidak menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, yaitu EAA (*European Association Agreement*) sehingga menimbulkan gelombang protes utamanya di kalangan mahasiswa. Tepatnya pada tanggal 21 November 2013 demonstrasi yang pada awalnya berlangsung secara damai untuk menuntut Viktor Yanukovych dan perdana menteri, Mykola Azarov agar menandatangani EAA, namun tuntutan tersebut meluas hingga menjelma menjadi sebuah revolusi untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa karena dinilai lebih condong kepada Rusia. Namun di sisi lain, tindakan tersebut justru memantik gerakan kontra-revolusi di wilayah Donbass, Ukraina Timur (Kurkov, 21/11/2014).

Gelombang demonstrasi tersebut berlanjut berbulan-bulan kemudian, hingga pada 18 Februari 2014 intensitas kerusuhan meningkat sehingga menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak demonstran maupun kepolisian. Lain halnya dengan wilayah Ukraina bagian timur dan selatan yang cenderung pro terhadap pemerintahan Yanukovych. Bahkan bahasa Rusia yang merupakan bahasa resmi di Ukraina kedua dilarang digunakan oleh parlemen Ukraina pada rentang 23-26 Februari, sehingga hal tersebut juga menjadi pemicu pemberontakan terutama di wilayah Ukraina timur yang menggunakan bahasa Rusia. Kemudian pada 1 Maret 2014 atas persetujuan dari parlemen Rusia, Vladimir Putin yang merupakan presiden Rusia mengerahkan kekuatannya guna memayungi kepentingan nasional Rusia (BBC News, 13/11/2014).

Demonstran yang pro-Rusia ini juga dikenal dengan sebutan anti-Maidan, pada awalnya mereka menolak akan terjadinya revolusi, hingga kemudian melebar ke arah separatis yang mendukung akan diadakannya referendum. Kemudian, pada 16 Maret 2014 diadakanlah referendum untuk menentukan tindakan politik Krimea yang dimana terdapat

dua opsi yakni, berada dibawah pemerintahan Rusia dengan menjadi subjek federal, atau tetap menjadi bagian dari Ukraina seperti pada Konstitusi Republik Krimea 1992 (Morello, Constable, & Faiola, 17/03/2014).

Dengan hasil mayoritas pemilih menginginkan bergabung dengan Federasi Rusia tersebut maka sehari setelah referendum dilaksanakan, kemerdekaan Krimea diproklamirkan oleh parlemen regional Krimea. Selain itu, parlemen regional Krimea juga mengajukan proposal untuk Federasi Rusia supaya Republik Krimea menjadi subjek baru di wilayah Federasi Rusia dengan bentuk republik. Adapun hal yang dilakukan parlemen regional Krimea tersebut berbuah manis, sehingga undang-undang integrasi Krimea akan dinyatakan lolos oleh majelis parlemen Rusia. Namun di sisi lain Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama Ukraina mengancam referendum tersebut. Bahkan Rusia diancam sanksi pembekuan aset dan juga larangan visa oleh Amerika Serikat beserta sekutu Eropanya (Harding & Walker, 17/03/2014).

Perang Hibrida yang Dilancarkan Rusia Terhadap Ukraina

Rusia menggunakan strategi perang hibrida dalam menjalankan aksinya. Adapun perang hibrida sendiri merupakan perpaduan antara instrumen militer dengan instrumen non militer. Pada sisi instrumen militer, hal itu dilakukan dengan hadirnya pasukan militer Rusia di Semenanjung Krimea yang juga mereka berbaur dengan separatis serta menyamar dengan menjadi *Green Little Army* untuk menciptakan situasi yang tidak stabil dan juga mengambil alih berbagai bangunan strategis di Semenanjung Krimea. Selanjutnya untuk instrumen non militer, Rusia menjadikan salah satu saluran televisi sebagai media propaganda dalam menyiarkan narasi strategis sebagai bentuk dari perang informasi. Kemudian pada sektor perekonomian, Ukraina dijegal serta ditekan oleh Rusia dengan gas

alam serta membebani dengan biaya yang lebih tinggi dari negara Eropa lainnya, sehingga menjadikan kondisi perekonomian Ukraina tidak stabil.

Secara sederhana, perang hibrida memerlukan interaksi atau perpaduan antara instrumen konvensional dengan instrumen non-konvensional yang dipadukan secara sinkron guna menggali kerentanan pihak lawan sehingga tercapainya efek yang sinergis. Perang hibrida sendiri memiliki dua karakteristik, yang pertama ialah situasi antara perang dan damai yang abu-abu sehingga terdapat dilema identifikasi pada ambang perang. Tentunya dengan karakteristik pertama tadi, perang hibrida dinilai lebih kecil biaya serta resikonya daripada operasi yang bersifat kinetik. Adapun perang kinetik merupakan aksi mobilisasi persenjataan konvensional dan melibatkan penggunaan bahan peledak guna menimbulkan kerusakan fisik yang merusak sumber daya, aset, dan juga kekuatan oposisi (IGI Global Publisher of Timely Knowledge, t.thn.). Karakteristik perang hibrida yang kedua adalah keterkaitan perang hibrida dengan atribusi dan juga ambiguitas, dengan ambiguitas dari aktor perang hibrida maka respon negara target akan semakin lambat sehingga atribusi dan pemangku kewenangan di negara target akan sulit serta rumit dalam memberikan respon strategisnya terhadap apa yang terjadi (Bilal, 30/11/2021).

Perang hibrida sendiri identik dengan perang asimetris yang merupakan kiat dari lawan yang lebih lemah daripada musuh untuk mengalahkan pihak musuh yang lebih unggul. Rusia memanfaatkan peran strategisnya dalam memadukan instrumen konvensional maupun non-konvensional untuk mengintimidasi dan juga menghalau musuhnya. Rusia bergantung pada perang hibrida yang merupakan instrumen dari keamanan serta kebijakan luar negerinya yang dapat dikalibrasi dengan ambisi politik dan

juga visi ideologisnya yang antara lain, menegaskan posisinya yang istimewa di Eurasia, memulihkan peringkat internasionalnya, dan juga kontribusi serta konsolidasi terhadap pembangunan Russky Mir (Palmer, 2015). Kedekatan Ukraina dengan NATO dan Uni Eropa merupakan sebuah tantangan bagi Rusia dalam menganeksasi Krimea sehingga Rusia menggunakan strategi perang hibrida dalam menjalankan aksinya. Hal ini dikarenakan ketimpangan baik di bidang ekonomi maupun militer dengan koalisi barat, selain itu penggunaan strategi perang hibrida bertujuan meminimalisir kerugian dan korban jiwa, karena Rusia mengerti bahwa NATO tidak mampu dikalahkan hanya dengan pertempuran konvensional biasa.

Analisis Teori Strategis Perang Hibrida di Krimea Tahun 2014

Analisis pertama dalam faktor-faktor yang memengaruhi Rusia dalam melaksanakan perang hibrida di Krimea tahun 2014 ini menggunakan teori strategis yang dikembangkan oleh Joseph M. Guerra dari teori strategis yang dijabarkan oleh Carl von Clausewitz. Dalam teori strategis ini, ditegaskan mengenai kombinasi strategi demi memenangkan perang serta kompetisi politik merupakan hal yang penting. Seperti yang diungkapkan oleh Clausewitz, bahwa perang bukanlah fenomena yang independen, namun merupakan modifikasi dari hubungan politik. Adapun teori strategis sendiri memiliki dua asas pelaksanaan, yakni untuk analisis sejarah militer dan juga sebagai kerangka kerja perencanaan perang. Penggunaan teori strategis ini ditujukan untuk memetakan perang hibrida yang dilakukan oleh Rusia, dan juga untuk membangun argumentasi dalam penelitian ini.

Sejarah Militer Rusia

Pada dasarnya praktik disinformasi, tindakan subversif, dan juga manipulasi yang

dipadukan dengan pendayagunaan pasukan khusus sudah diterapkan sejak lama oleh Uni Soviet. Bahkan dalam KGB sendiri terdapat suatu departemen khusus yang memiliki tugas *active measures* dalam merusak dan juga melemahkan pihak Barat (Kuzio & D'Anieri, 17/06/2018). *Active measures* ini merupakan aktivitas yang mencakup berbagai upaya ofensif yang ditujukan untuk sabotase, spionase, disinformasi, destabilisasi, serta penipuan yang mana hal tersebut timbul dari asumsi dan kebijakan luar negeri Uni Soviet, dengan target yaitu menjadikan lawannya terdesak sehingga mereka bertindak sesuai dengan siasat yang diharapkan oleh Moskow. Singkatnya ini merupakan upaya untuk memberikan pengaruh terhadap musuh agar terciptanya situasi yang bermanfaat pada keberhasilan terhadap implementasi tujuan luar negeri Uni Soviet (Darczewska & Żochowski, 2017).

Berdasarkan dari asumsi teori strategis Clausewitz, yakni semua perang dalam sejarah memiliki karakteristik umum tertentu, sebagai contoh bahwa sifat perang tidak benar-benar berubah namun peperangan serta cara perang berlangsung itulah yang mengalami proses perubahan konstan (Guerra, 2012). Tindakan yang dilakukan Uni Soviet pada masa lalu senada dengan apa yang dikerjakan oleh Rusia dengan perang hibridanya di masa kini. Cara perang non-konvensional yang dilakukan oleh Rusia mengalami perkembangan yang didukung dengan masifnya perkembangan teknologi dan informasi di era sekarang dimana ada media sosial khususnya dan dunia maya umumnya sebagai perpanjangan tangan dari distribusi narasi strategis dan juga propaganda Rusia dalam menjalankan kepentingannya.

Kerangka Kerja Perencanaan Perang Hibrida Rusia

Berdasarkan penjabaran teori strategis dari Guerra, asas pelaksanaan teori strategis yang dikemukakan oleh Clausewitz selanjutnya ialah kerangka kerja perencanaan perang. Pada

dasarnya terdapat ketimpangan dari segi militer dan juga ekonomi antara Rusia dengan NATO yang merupakan aliansi militer, sehingga apabila terjadi tindakan perang kinetik antar keduanya maka hal tersebut akan terjadi efek destruktif yang menimbulkan kerugian baik dari materi maupun korban jiwa, maka dari itu Rusia menggunakan perang hibrida supaya menjaga NATO agar tetap tidak seimbang.

Pimpinan Rusia sendiri merasa bahwa militer konvensional berada di bawah Barat secara umum, dan NATO secara khusus. Hal ini lalu menjadi permasalahan bagi Rusia karena Rusia tidak mampu berkompetisi dalam pertandingan kekuatan nasional, politik, maupun militer konvensional dengan Barat atau NATO. Maka dari itu, Rusia mendistribusikan berbagai kekacauan dengan cara yang bersifat asimetris melalui politik subversif, disinformasi, perang ekonomi, serangan siber, dan sejenisnya (Boulègue & Polyakova, 29/01/2021). Adapun perang asimetris sendiri merujuk pada buah pikiran dari Jenderal Valery Gerasimov, yang dimana para pengamat Barat menyebutnya sebagai "Doktrin Gerasimov" yang juga dipandang sebagai arah baru dari operasi militer Rusia kepada perang hibrida.

Implementasi dari Doktrin Gerasimov ialah ketika terjadinya peristiwa Euromaidan, dengan intensitas yang lebih dari perang informasi maka tercipta situasi dan kondisi yang kacau serta subjek yang abu-abu sehingga memungkinkan Rusia dalam mengendalikan situasi tersebut, selain itu juga dengan kehadiran *polite green men* atau *green little army* serta para fraksi pemberontak pro-Rusia yang turut serta mendestabilisasikan situasi Semenanjung Krimea pada masa krisis. *Green little army* atau *polite green men* yang "ditenggarai" sebagai pasukan khusus Rusia yang menyamar dengan seragam militer tanpaencana dan tanda pengenal dalam pendudukan Krimea merupakan salah satu

bentuk dari operasi kinetik yang dilakukan oleh Rusia. Tujuan dari pasukan tanpaencana tersebut ialah supaya dunia internasional tidak bereaksi terhadap Rusia akan aktivitas militernya di Krimea (Jopling, 2008).

Analisis Faktor-faktor Keamanan Nasional dalam Strategi Perang Hibrida Rusia di Krimea

Analisis selanjutnya pada faktor-faktor yang memengaruhi Rusia dalam melaksanakan perang hibrida di Krimea tahun 2014 ini menggunakan konsep keamanan nasional yang dicetuskan oleh Prabhakaran Paleri. Paleri sendiri menyatakan bahwa terdapat 15 unsur keamanan nasional. Namun dalam analisis ini peneliti, hanya menggunakan 4 unsur dari keamanan nasional yang relevan dengan penelitian ini. Adapun empat unsur tersebut, antara lain; keamanan militer, keamanan ekonomi, keamanan geostrategis, dan juga keamanan etnis.

1. Ambisi Rusia sebagai aktor utama di Laut Hitam (faktor militer)

Paleri (2008: 126) menyatakan bahwa dahulu perang lebih mengarah kepada penguasaan terhadap sumber daya. Namun dalam perjalanannya, perang justru mejadi kendaraan dalam pendudukan serta menanamkan kontrol atas suatu wilayah atau negara, dan juga penyebaran agama. Adapun dalam dinamikanya saat ini, *military security* merupakan bentuk dari membentengi keamanan fisik suatu negara yang berkesinambungan terhadap kepentingan ekonomi dan juga pencegahan terhadap agresi asing. Karena nilainya yang strategis baik itu dari sisi geoekonomi maupun geostrategis, Rusia berusaha menegaskan posisinya di Laut Hitam sebagai aktor utama dengan kekuatan angkatan laut yang mendominasi di kawasan tersebut.

Ambisi Rusia dalam menjadi aktor utama di kawasan Laut Hitam tidak terlepas dari keinginannya pada kontrol penuh terhadap

Black Sea Fleet yang dimana konflik tersebut berakar dari klaim atas yurisdiksi *Black Sea Fleet* antara Rusia dengan Ukraina setelah bubarnya Uni Soviet (Dobbs, 08/04/1992). Pada akhirnya Rusia dan Ukraina sepakat untuk membagi *Black Sea Fleet* setelah berbagai kesepakatan yang tidak mencapai titik temu antara keduanya. Pangkalan tersebut pun digunakan oleh Rusia dengan menyewanya dari Ukraina juga beberapa alternatif selain membayar biaya sewa yang diberikan oleh Rusia kepada Ukraina seperti memberikan keringanan hutang terhadap Ukraina serta menyalurkan pasokan energi (Erlanger, 10/06/1995).

Dengan terjadinya peristiwa Euromaidan, kekhawatiran Rusia akan terbentuknya pemerintahan yang pro-Barat memberikan dampak buruk terhadap perjanjian sewa pangkalan armada Laut Hitam kepada Ukraina. Maka dari itu, keputusan Rusia dalam menganeksasi Krimea merupakan signifikansi strategis dari markas di *Black Sea Fleet* sebagai alasan substansial terhadap para pembuat keputusan di Rusia untuk mencaplok Semenanjung Krimea. Karena barang siapa yang dapat menguasai Krimea maka secara sederhana dapat menandakan posisinya yang menonjol di seluruh kawasan Laut Hitam, sebab Laut Hitam merupakan "rumah" bagi beberapa negara (Bodner, 17/03/2016).

Maka dari itu dengan adanya Semenanjung Krimea di genggaman Rusia, menjadikan Rusia dapat membentengi keamanan fisik negaranya. Sebab dengan keamanan militer yang kokoh ini, nantinya mampu menjadi pencegahan terhadap agresi negara lainnya sehingga mampu mencapai stabilitas politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Paleri (2008: 67) menyatakan bahwa keamanan militer merupakan elemen tertua dari keamanan nasional, selain itu juga keamanan militer adalah elemen kunci sebab membawa pengaruh kekuatan dalam memengaruhi rasa takut yang sudah

tertanam dalam jiwa manusia. Maka dengan hal ini Rusia berusaha membawa negaranya agar tetap menjadi taring di kawasan Laut Hitam dan mengimbangi hegemoni NATO yang merupakan pesaingnya. Sehingga dengan tercapainya keamanan nasional, maka hal tersebut berkesinambungan terhadap stabilitas politik dan juga ekonomi negara tersebut.

2. Penegasan pengaruh tekanan ekonomi Rusia terhadap Eropa (faktor ekonomi)

Pada penelitian ini akan menjabarkan persepektif lain dari faktor keamanan ekonomi yakni berupa tekanan ekonomi dari suatu negara dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian negara lainnya, sebab sudah terdapat penelitian yang mengangkat perihal untung rugi dari perang hibrida ini. Paleri (2008: 154) menjelaskan bahwa tujuan dari *economic security* ialah menjadikan negara yang secara ekonomi kuat dan profesional selaku partisipan ekonomi global. Tindakan yang kurang bersahabat dari Rusia terhadap tindakan ekonomi Uni Eropa yang memengaruhi Ukraina menjadikan Rusia menekan kerja sama antara Ukraina dengan Uni Eropa, yakni EAA. Perilaku Rusia ini menyiratkan bahwa Rusia ingin agar menjadi negara yang kuat secara ekonomi, sehingga dari kuatnya perekonomian tersebut Rusia mampu menyebarkan pengaruhnya kepada negara-negara lainnya.

Dalam aksi non-konvensionalya terhadap Ukraina, Rusia menggunakan salah satunya perangkat ekonomi sebagai media dalam menyerang serta menekan Ukraina. Paleri (2008: 155) menyatakan bahwa peperangan ekonomi dapat didefinisikan untuk mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi suatu negara dengan mengorbankan negara lainnya. Pada penerapannya, Rusia kerap menggunakan sumber dayanya yang berupa gas serta energi sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negerinya semenjak tahun 1990. Bahkan sudah beberapa kali aliran gas ke Ukraina dibatasi,

dinaikkan harganya, dan juga gangguan lain seperti diancam dinonaktifkan gasnya oleh Rusia (Neville, 2015).

Ketika masa pendudukan di Krimea, ladang gas Ukraina yang berada di dalam dan di sekitar Krimea berhasil dikuasai oleh Rusia dengan menggunakan upaya militer tradisional. Tentunya hal ini berdampak terhadap perekonomian Ukraina yang mana Rusia memberikan tekanan dengan memutuskan aliran gas, dan juga menghalau negara Eropa lainnya dalam membantu Ukraina. Rusia juga tidak lupa memberikan ancamannya terhadap keamanan energi Eropa apabila negara-negara Eropa mendukung Ukraina, hal ini dikarenakan negara-negara Eropa bergantung pada gas Rusia (Rühle & Grubliauskas, 2015).

Demi membangun pengaruh politik yang efektif, Rusia menasionalisasikan perusahaan milik Ukraina yang beroperasi di Krimea yakni Chornomornaftogaz dengan segala aset energinya baik di daratan maupun lepas pantai. Nasionalisasi dan penguasaan Rusia terhadap Krimea juga menjadikan Rusia mendapatkan daratan Krimea yang diikuti dengan zona maritim beserta sumber daya bawah lautnya dengan nilai triliunan dolar yang menjadikan Ukraina lumpuh dalam hal kemandirian energi (Rusnáková, 2017). Dari pengertian mengenai keamanan ekonomi yang diutarakan oleh Paleri, penulis berusaha menyoroti tujuan dari keamanan ekonomi tersebut yaitu menjadikan negara secara ekonomi kuat, sehingga mampu menyebarluaskan serta menanamkan pengaruh ekonominya terhadap negara lain. Hal ini sejalan dengan sikap Rusia yang menaikkan biaya gas kepada Ukraina sebesar 81%, dari \$268,50 menjadi sebanyak \$485,50 untuk ukuran 1000 meter kubik, yang mana harga tersebut merupakan yang tertinggi di Eropa. Di sisi lain kenaikan harga gas terhadap Ukraina berpengaruh terhadap pasokan gas ke Eropa, sebab 40% dari gas Rusia kepada Eropa tersebut melewati Ukraina (BBC News, 05/04/2014). Sebab, gangguan yang

signifikan terhadap pasokan gas ke Ukraina mampu menyebabkan kerugian pada sektor perusahaan dan juga rumah tangga Eropa (CNN Money, 02/05/2014). Bahkan Komisi Eropa memberikan peringatan apabila ketegangan yang terjadi dengan Rusia meningkat maka hal ini mampu menyebabkan gangguan yang besar dalam hal pasokan gas serta minyak yang diikuti dengan kenaikan harga yang melambung tinggi, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap sejumlah negara anggota Uni Eropa (CNN Business, 05/05/2014).

3. Ukraina sebagai zona penyangga antara Rusia dengan Barat (faktor geostrategis)

Menurut Paleri (2008: 258), dengan geostrategi maka ketentraman dan kelangsungan eksistensi yang abadi mampu diraih oleh suatu bangsa. Dibalik terdapat beberapa hal yang dapat mengancam geostrategi itu sendiri, antara lain terorisme lintas batas, kriminalitas transnasional, suasana kondisi demografis, dan juga aspek lingkungan serta ekonomi (Paleri, 2008; 195). Dalam pandangan Rusia, Ukraina memiliki sisi strategisnya tersendiri sebab Ukraina merupakan benteng pertahanan Rusia dalam menghalau pengaruh NATO dan juga Uni Eropa terutama di wilayah Eropa Timur. Bahkan kemitraan antara Ukraina dengan NATO maupun Uni Eropa ditentang oleh Rusia secara terbuka, sebab dinilai dapat mengancam kepentingannya.

Pada kaca mata geostrategis Barat, Ukraina merupakan aktor yang memiliki kedudukan penting bagi Uni Eropa sebab Ukraina dapat menjadi gerbang dalam perluasan keanggotaan di wilayah Eropa Timur. Bahkan apabila Ukraina masuk dalam keanggotaan NATO, Ukraina nantinya akan menjadi zona penyangga dalam menghadang ancaman militer Rusia. Tak ayal apabila Uni Eropa yang juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat, begitu ingin menjadikan Ukraina sebagai anggota NATO. Sehingga disini Ukraina merupakan zona yang diantisipasi oleh Rusia,

sebab beberapa negara yang dahulu menganut ideologi sosialis-komunis di Eropa telah menjadi anggota dari Uni Eropa sehingga Rusia seakan kehilangan mitranya dalam menghadapi hegemoni Barat yang hampir tak terbendung di wilayah Eropa Timur (Kompas, 14/03/2022).

Maka dengan tidak masuknya Ukraina ke dalam aliansi Barat, baik NATO maupun Uni Eropa mampu menentramkan eksistensi Rusia sebagai aktor yang memiliki pengaruh kuat di Eropa timur. Sebab apabila Ukraina bergabung dengan aliansi Barat, tentu hal ini merupakan ancaman serius bagi Rusia, yang nantinya mampu membuat pergolakan politik, ekonomi, dan juga keamanan semakin tidak stabil terutama di wilayah Eropa dan Amerika Serikat yang merupakan sekutu Barat. Bahkan penentangan akan ekspansi NATO ke wilayah Eropa Timur sudah dikumandangkan oleh pemimpin Soviet terdahulu, seperti Boris Yeltsin dan juga Mikhail Gorbachev (Menon, 10/02/2022). Di sisi lain, pada 12 Februari 2008 Putin yang ketika itu menjabat sebagai presiden Rusia pernah mengancam akan menjadikan Ukraina sebagai target rudalnya apabila Ukraina bergabung pada NATO (BBC News, 12/02/2008).

4. Perlindungan terhadap etnis Rusia dan penutur Bahasa Rusia (faktor etnis)

Menurut Paleri (2008: 72), keamanan etnis ialah kondisi dimana tidak adanya marjinalisasi kepada berbagai spesies manusia. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi keamanan etnis ialah di antaranya, etno-nasionalisme dan juga sengketa teritorial. Penduduk di Semenanjung Krimea mayoritas memiliki etnis Rusia, dan juga pada tahun 2014 terdapat 84% penduduknya menggunakan bahasa Rusia. Krimea selama dua ratus tahun menjadi bagian dari Rusia, sebelumnya juga Krimea sempat dikuasi oleh berbagai aktor regional lainnya. Terdapat fakta bahwa ada dukungan terhadap Rusia untuk mengambil

kembali Krimea setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 (Vox, 03/11/2014). Berangkat dari hal tersebut, ketika terjadinya krisis yang menimipka Ukraina dengan puncaknya di tahun 2014, secara tersirat Putin menginstruksikan agar melindungi etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia di Krimea.

Berbeda dengan wilayah Ukraina bagian barat dan utara, pada dasarnya wilayah Ukraina bagian timur serta selatan memiliki kecenderungan mendukung pemerintahan Victor Yanukovych yang condong ke Rusia. Namun pada 23-26 Februari penggunaan bahasa Rusia yang merupakan bahasa resmi kedua di Ukraina dilarang digunakan oleh parlemen Ukraina. Pelarangan dalam penggunaan bahasa Rusia tersebut pada akhirnya menyulut aksi pemberontakan khususnya di Ukraina timur yang kebanyakan penduduknya menggunakan bahasa Rusia. Putin sendiri melakukan penawaran akan membela mantan pemerintahan sah Ukraina yang digulingkan secara ilegal ketika terjadinya peristiwa Euromaidan, Putin juga menyatakan bahwa Yanukovych meminta bantuan militer kapada Rusia. Sehingga Rusia nantinya akan memiliki alasan hukum melakukan bantuan militer, dengan menunjukkan surat dari Yanukovych dalam menekan pemberontakan yang terjadi (Washington Post, 04/03/2014).

Sehingga pada 1 Maret 2014 Vladimir Putin yang juga mendapat lampu hijau dari parlemen Rusia, mengerahkan kekuatannya dalam melindungi kepentingan nasional Rusia. Hal ini tentunya memuluskan Rusia dalam menjalankan serangkaian aksi hibridanya di Semenanjung Krimea. Bahkan pemerintahan Rusia menyebutkan dengan apa yang dikenal sebagai Doktrin Putin, yakni bahwa Moskow memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi Rusia di mana pun di dunia (Coalson, 10/04/2014). Putin sendiri menyatakan bahwa, Rusia akan secara aktif dalam membela hak-hak Rusia serta kompatrit Rusia di luar negeri dengan berbagai cara seperti ekonomi hingga operasi di bawah

hukum humaniter internasional, dan juga hak atas diri sendiri atau pertahanan. Pengerahan kekuatan Rusia didasari atas peristiwa yang berusaha memengaruhi keamanan etnis Rusia di Ukraina secara umum.

PENUTUP

Dalam menjalankan aksi hibridanya Rusia menggunakan kombinasi antara instrumen konvensional dengan non-konvensional. Pada sisi konvensional, Rusia menyertakan batalyon Spetsnaz dan beberapa unit lainnya dalam mengeksekusi perintah Putin. Pada aksinya, mereka juga menyamar sebagai milisi pertahanan lokal. Selain itu juga terdapat *Green Little Army* atau *Polite Green Men* yang merupakan pasukan khusus Krimea dengan penyamarannya menggunakan seragam militer tanpa lencana dan tanda pengenal yang bertugas untuk menciptakan suasana tidak kondusif dan berafiliasi dengan separatis.

Kehadirannya digunakan oleh Rusia sebagai bentuk penyangkalan Rusia terhadap aktivitas militernya di Krimea yang memudahkan Rusia untuk mengambil kendali di Semenanjung Krimea. Pada sisi non-konvensional, Rusia menggunakan perang informasi dalam mendistribusikan narasi strategisnya untuk memengaruhi dan juga membentuk opini publik. Rusia juga menekan Ukraina dari segi ekonomi yang mana hal itu dilakukan Rusia melalui pemutusan aliran gas yang mengganggu perekonomian Ukraina, bahkan Eropa.

Tindakan perang hibrida oleh Rusia dipengaruhi oleh dua faktor yang dalam kacamata teori strategis Clausewitz terdapat dua aspek penerapan, yakni; (1) pada aspek analisis sejarah militer, praktik perang hibrida yang dilakukan oleh Rusia ini sudah sejak lama diterapkan oleh Uni Soviet yang mana mencakup tindakan subversif, manipulasi, dan juga disinformasi. Namun cara perang non-konvensional ini mengalami perkembangan seiring dengan masifnya

perkembangan teknologi dan juga informasi yang didukung dengan hadirnya dunia maya sebagai perpanjangan tangan dari aksi propaganda Rusia; (2) aspek selanjutnya ialah kerangka kerja pelaksanaan perang, yang mana Rusia menerapkan Doktrin Gerasimov dalam menghadapi pengaruh NATO di Ukraina. Doktrin Gerasimov sendiri merujuk pada perang asimetris yang dipandang sebagai arah dari perang hibrida, sebab pimpinan Rusia merasa bahwa militer konvensional berada di bawah NATO.

Selanjutnya dari sisi keamanan nasional menurut Paleri, faktor-faktor yang memengaruhi Rusia dalam melakukan perang hibrida, antara lain; (1) faktor militer, dimana Rusia memperjuangkan Black Sea Fleet yang merupakan perangkat Rusia dalam memproyeksikan pengaruhnya ke wilayah lain; (2) faktor ekonomi, Rusia bertujuan menegaskan masifnya pengaruh ekonominya di Eropa; (3) faktor geostragis, Ukraina merupakan buffer zone bagi Rusia karena merupakan benteng yang menghalau pengaruh Barat ke wilayah Eropa Timur; Terakhir (4) faktor keamanan etnis, Rusia berusaha melindungi etnis Rusia dan juga penutur bahasa Rusia disana, yang mana hal ini juga merupakan implementasi dari Doktrin Putin.

Berdasarkan dari hasil penelitian, topik yang diangkat oleh penulis ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Adapun penulis memberikan saran supaya dapat dilakukan penelitian lanjutan yang berfokus dalam meneliti perilaku Rusia terhadap Ukraina dan Eropa, mengingat konflik antara Rusia dengan Ukraina kembali memanas di tahun 2022 ini.

Daftar Pustaka

- Alexander, K. B. (2017). *Disinformation: A Primer in Russian Active Measures and Influence Campaigns before the United States Senate Select Committee on Intelligence*.
- BBC News. (2008, Februari 12). *Russia in Ukraine missile threat*. Diambil kembali dari BBC News: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7241470.stm/>

- Pada 12 Mei 2022.
- BBC News. (2014, April 5). Ukraine Rejects Russia Gazprom Gas Price Hike. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/business-26902522/> Pada 10 Mei 2022.
- BBC News. (2014, November 13). Ukraine Crisis: Timeline. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275/> Pada 23 Desember 2021.
- Bebler, A. (2015). Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict. *Romanian Journal of European Affairs*. Hal: 35-54.
- Bilal, A. (2021, November 30). Hybrid Warfare – New Threats, Complexity, and ‘Trust’ as the Antidote. Diambil kembali dari NATO Review: <https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/11/30/hybrid-warfare-new-threats-complexity-and-trust-as-the-antidote/index.html/> Pada 31 Januari 2022.
- Bodner, M. (2016, Maret 17). Black Sea Rising: Rebirth of a Russian Fleet. Diambil kembali dari The Moscow Times: <https://www.themoscowtimes.com/2016/03/17/black-sea-rising-rebirth-of-a-russian-fleet-a52191/> Pada 8 Mei 2022.
- Boulègue, M., & Polyakova, A. (2021, Januari 29). The Evolution of Russian Hybrid Warfare: Executive Summary. Diambil kembali dari CEPA: <https://cepa.org/the-evolution-of-russian-hybrid-warfare-introduction/> Pada 6 Mei 2022.
- Coalson, R. (2014, April 10). putin Pledges To Protect All Ethnic Russians Anywhere. So, Where Are They? Diambil kembali dari Radio Free Europe Radio Free Liberty: <https://www.rferl.org/a/russia-ethnic-russification-baltics-kazakhstan-soviet/25328281.html/> Pada 12 Mei 2022.
- Darczewska, J., & Żochowski, P. (2017). Active Measures, Russia's Key Export. *Point of View*, Hal: 1-71.
- Djumala, D. (2022, Maret 14). Ukraina, Pelanduk di Bumi Eropa. Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/13/ukraina-pelanduk-di-bumi-eropa/> Pada 11 Mei 2022.
- Dobbs, M. (1992, April 8). Russia, Ukraine both Claim Control over Black Sea Fleet. Diambil kembali dari The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1992/04/08/russia-ukraine-both-claim-control-over-black-sea-fleet/6926dd15-393b-4a5e-802b-960bf6a80b8b/> Pada 6 Januari 2022.
- Erlanger, S. (1995, Juni 10). Russia and Ukraine Settle Dispute Over Black Sea Fleet. Diambil kembali dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/1995/06/10/world/russia-and-ukraine-settle-dispute-over-black-sea-fleet.html/> Pada 13 Januari 2022.
- Fisher, M. (2014, September 3). Everything you need to know about the 2014 Ukraine crisis. Diambil kembali dari Vox: <https://www.vox.com/2014/9/3/18088560/ukraine-everything-you-need-to-know/> Pada 11 Mei 2022.
- Guerra, J. M. (2012). An Introduction to Clausewitzian Strategic Theory: General Theory, Strategy, and their Relevance for Today. *Infinity Journal*, Hal: 30-34.
- Harding, L., & Walker, S. (2014, Maret 17). Crimea applies to be part of Russian Federation after vote to leave Ukraine. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/ukraine-crimea-russia-referendum-complain-result/> Pada 29 Desember 2021.
- IGI Global Publisher of Timely Knowledge. (t.thn.). What is Kinetic Warfare. Diambil kembali dari IGI Global Publisher of Timely Knowledge: igi-global.com/dictionary/a-geo-political-analysis/90171/ Pada 3 Juli 2022.
- Thompson, M. (2014, Mei 2). Russia sets Ukraine Gas Bill Deadline. Diambil kembali dari CNN Money: <https://money.cnn.com/2014/05/02/news/russia-ukraine-gas/index.html?iid=EL/> Pada 10 Mei 2022.
- Jopling, L. (2018). Countering Russia's Hybrid Threats: An Update. *NATO Parliamentary Assembly*.
- Kuzio, T., & D'Anieri, P. (2018, Juni 25). Annexation and Hybrid Warfare in Crimea and Eastern Ukraine. Diambil kembali dari E-International Relations: <https://www.e-ir.info/2018/06/25/annexation-and-hybrid-warfare-in-crimea-and-eastern-ukraine/> Pada 13 Januari 2022.
- Kurkov, A. (2014, November 21). Ukraine's revolution: Making sense of a year of chaos.

- Diambil kembali dari BBC News: [https://www.bbc.com/news/world-europe-30131108/](https://www.bbc.com/news/world-europe-30131108) Pada 19 Desember 2021.
- Lally, K., & Englund, W. (2014, Maret 4). Putin says he reserves right to protect Russians in Ukraine. Diambil kembali dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/putin-reserves-the-right-to-use-force-in-ukraine/2014/03/04/92d4ca70-a389-11e3-a5fa-55f0c77bf39c_story.html/ Pada 12 Mei 2022.
- Menon, R. (2022, Februari 10). The Strategic Blunder That Led to Today's Conflict in Ukraine. Diambil kembali dari The Nation: <https://www.thenation.com/article/world/nato-clinton-ukraine-russia/> Pada 12 Mei 2022.
- Morello, C., Constable, P., & Faiola, A. (2014, Maret 17). Crimeans vote in referendum on whether to break away from Ukraine, join Russia. Diambil kembali dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/2014/03/16/cccec2132-acd4-11e3-a06a-e3230a43d6cb_story.html/ Pada 23 Desember 2021.
- Neville, S. B. (2015). *Russia and Hybrid Warfare: Identifying Critical Elements in Successful Applications of Hybrid Tactics*. California: Naval Postgraduate School.
- North Atlantic Treaty Organization. (2020, November 11). North Atlantic Treaty Organization. Diambil kembali dari Relations with Ukraine: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm/ Pada 25 Januari 2021.
- Paleri, P. (2008). *National Security: Imperatives and Challenges*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Palmer, D. A. (2015). Back to the Future? Russia's Hybrid Warfare, Revolutions in Military Affairs, and Cold War Comparisons. *NATO Research Paper*, Hal: 1-12.
- Pikulicka-Wilczewska, A., & Sakwa, R. (2015). *Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives*. Bristol: E-International Relations Publishing.
- Rühle, M., & Grubliauskas, J. (2015). Energy as a Tool of Hybrid Warfare. *NATO Research Paper*, Hal: 1-8.
- Rusnáková, S. (2017). *Russian New Art of*